



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Jokowi Harap Pertumbuhan Ekonomi Hijau Jadi Prioritas Kerja Sama ASEAN Plus Three
Tanggal : Rabu, 06 September 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : -

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pembangunan ekonomi hijau dapat menjadi prioritas kerja sama dalam ASEAN Plus Three (APT). ASEAN Plus Three terdiri dari negara-negara ASEAN dengan Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka KTT ke-26 ASEAN Plus Three sebagai rangkaian puncak KTT ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/9). Seperti diberitakan Indonesia saat ini tengah memegang keketuan ASEAN. Selama lebih dari dua dekade, sambung Jokowi, ASEAN Plus Three telah membuahkan banyak hasil dan menjadi motor pertumbuhan di kawasan.

"Kita harus terus membuka dan menciptakan peluang-peluang kerja sama baru, dimana pembangunan ekonomi hijau dapat jadi salah satu prioritas ke depan.

Namun, ia mengingatkan agar ASEAN Plus Three tidak berpuas diri. Ia mengajak pimpinan negara yang hadir membuka peluang kerja sama baru untuk pembangunan ekonomi hijau.

ASEAN, terang Jokowi, sangat menghargai dukungan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, dan Republik Korea untuk pengembangan ekosistem baterai listrik atau electronic vehicle (EV). Jokowi menambahkan bahwa ketiga negara tersebut, juga aktif memberikan dukungan sebagai mitra dalam ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF).

"Ini (dukungan 3 negara dalam ASEAN Plus Three) penting bagi kemajuan dan pertumbuhan kawasan. Namun demikian, tujuan tersebut pasti akan terganggu jika perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak mampu kita jaga," tuturnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak para pimpinan ASEAN Plus Three untuk memiliki kesadaran dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan termasuk menghormati hukum internasional.

"Memiliki rasa yang sama, memiliki kesadaran yang sama, untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan terus menghormati hukum internasional," tukasnya. (Z-10)